
KONSEP POPULISME KIRI DALAM KRITIK DEMOKRASI LIBERAL PADA PEMIKIRAN CHANTAL MOUFFE DAN ERNESTO LACLAU

Oleh:

Tedy Aprilianto

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email: tedy.apr2003@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 20 Januari 2025
Naskah Direvisi : 12 Februari 2025
Naskah Disetujui : 25 Maret 2025
Tersedia Online : 16 April 2025

Keywords:

Left Populism, Liberal Democracy, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau

Kata Kunci:

Populisme Kiri, Demokrasi Liberal, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau

This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Publishing House

ABSTRACT

This research examines the concept of left populism in criticism of liberal democracy based on the thoughts of Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. Liberal democracy is often considered to be experiencing a crisis of legitimacy due to social, political and economic inequality. Mouffe and Laclau offer left populism as an alternative to revive democracy by bringing politics closer to the people. This research uses a systematic-reflective model of literature study approach to identify the thoughts of the two figures. The results of this research are findings related to understanding the challenges and opportunities of populism in responding to the crisis of liberal democracy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep populisme kiri dalam kritik terhadap demokrasi liberal berdasarkan pemikiran Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau. Demokrasi liberal sering dianggap mengalami krisis legitimasi akibat ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi. Mouffe dan Laclau menawarkan populisme kiri sebagai alternatif untuk menghidupkan kembali demokrasi dengan mendekatkan politik kepada rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka model sistematis-reflektif untuk mengidentifikasi pemikiran kedua tokoh. Hasil penelitian ini adalah temuan terkait dengan memahami tantangan dan peluang populisme dalam merespons krisis demokrasi liberal.

I. PENDAHULUAN

Diskursus populisme menjadi salah satu bagian fokus studi yang terkait dengan bagian tubuh politik global melalui partai politik, gerakan sosial, pemimpin yang berkharisma. Diskursus ini menempatkan seluruhnya penjelmaan politik sebagai ide dan alat untuk kekuatan politik yang diperhitungkan. Bentuk-bentuk sedemikian rupa memiliki tujuan untuk memikat opini publik dan memenangkan kontestasi politik elektoral, serta menggapai kursi kekuasaan. Dalam literatur dengan

*Corresponding author

tema populisme yang berjudul, *Populism: Its Meaning and National Character* (1969), Ghita Ionescu dan Ernest Gellner mengimplisitkan sebuah pernyataan tesis dan kesimpulan yang berbunyi “*A spectre is haunting the world: populism.*” Tesis tersebut dilontarkan beberapa dekade lalu. Namun, sekarang telah mengevolusi gaya hidup berpolitik baru di berbagai belahan dunia. Pada konteks Indonesia sendiri, keberadaan gelombang populisme mewarnai perhelatan politik elektoral. Dimulai dari gerakan 212, pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, narasi “2019 Ganti Presiden”, “Kampret vs Cebong”, serta “Petani Setan vs Petani Allah. Fenomena tersebut menjadi gerakan baru dengan narasi-narasi populisme.

Menurut Abdillah Toha (*Kompas.id*, 2018), memperkirakan gelombang dari gerakan populisme ini akan mewarnai momen dan dinamika dari politik Indonesia secara berkelanjutan. Dinamika politik kedepannya; perilaku para pelaku politik dalam meraih simpati pemilih cenderung lebih ke arah ide-ide populis. Sebagai sebuah jalan dan strategi berpolitik, populisme sendiri menuai kritik pada ambiguitas dan paradoks. Bahkan, populisme juga mendapatkan berbagai kecaman. Keberadaan Kecaman tersebut, diajukan kepada populisme ini disebabkan oleh subjek karakter yang memiliki sifat non-demokratis dan cenderung dianggap mengganggu sistem demokrasi itu sendiri, seperti xenophobia, intoleransi, mengeklusi narasi ‘yang-lain’-‘yang-berbeda’.

Populisme sering dianggap membedakan antara *authentic-people* dan *non-authentic people* (Zaenuri, 2019). Dikotomi yang oposisi biner sering kali menciptakan konflik ditengah-tengah masyarakat. Populisme telah menjelaskan mengenai segregasi yang jelas tentang antara ‘yang pribumi’ dan ‘non-pribumi’, ‘anti-asing’ dan ‘anti-cina’. Segregasi ini nampak dalam berbagai gerakan populisme sayap kanan (*right-wing populism*); yang menjadi dasar kepentingan identitas primordial (ras, etnik), sentimen nasional, dan kekuatan budaya di tengah gelombang globalisasi.

Pada konteks ini, populisme kanan disebut sebagai, “*a form identity politics (though not all versions of identity politics are populist)*” (Müller, 2016: 2). Populisme sayap kanan ini sering mendapat stigma sebagai “pemecah demokrasi”. Hal tersebut di afirmasi oleh Cas Mudde (*The Guardian*, 2015) yang berpendapat bahwa, populisme seringkali dihubungkan dengan kanan-radikal dan menjadi ancaman bagi demokrasi liberal. Populisme sering dicap sebagai sesuatu ‘duri’ bagi berlangsungnya dinamika demokrasi liberal. Namun, populisme sebenarnya bukan hanya bicara mengenai pergerakan dari sayap kanan saja, tetapi terdapat juga pergerakan dari populisme sayap kiri (*left-wing populism*) yang berkiblat pada emansipasi, perbedaan kelas ekonomi, kesenjangan sosial dan keluhan sosial penyebab dari ketidakstabilan ekonomi. Populisme sayap kiri lebih memperlihatkan sentimen anti-kapitalisme dan anti imperialisme. Populisme sayap kiri ini sesuai dengan namanya sangat identik dengan gagasan dan ide kiri seperti marxisme, sosialisme, dan komunisme. Mudde dan Kaltwasser menyebut bahwa, “*most left-wing populist combines populism with some form of socialism, while right wing populist tends to combine it with some type of nationalism.*

(Mudde dan Kaltwasser, 2017: 21).

Berangkat dari argumentasi tersebut, populisme digunakan sebagai alat untuk menjelaskan partai, kelompok atau tokoh sayap kiri sekaligus sayap kanan. Konteks ini, menjadikan konsep mengenai populisme bersifat sedikit abstrak sehingga, sulit untuk didefinisikan secara jelas dan pasti karena populisme ini merupakan fenomena pada tataran praktis. Perdebatan mengenai arti dan definisi dari populisme sendiri menjadi hal yang tak terelakan. Populisme menjadi *an essentially contested concept* (Mudde dan Kaltwasser, 2017:2). Melekatnya populisme baik pada ideologi sayap kiri maupun sayap kanan memunculkan kecurigaan dan stigma terhadap populisme yang diyakini hanya sebagai bentuk lain dari pragmatisme dan oportunisme politik. Para populis hanya memanfaatkan isu-isu yang menyentuh emosional rakyat dan mengklaim atas nama dari rakyat sebagai suara rakyat yang sah. Demi memenangkan politik elektoral, menggapai kursi kekuasaan, dari situlah populisme dicap buruk.

Namun, gagasan yang jarang disoroti dalam populisme terletak pada respon terhadap demokrasi liberal. Demokrasi liberal, pada dasarnya, telah mengkrangkeng kehendak rakyat, dan wakil rakyat (*elected politicians*) yang terpilih lewat proses politik dalam sistem demokrasi mengabaikan aspirasi rakyat (Mudde dan Kaltwasser, 2017). Argumentasi tersebut memunculkan dikotomi rakyat *vis a vis* elite. Sehingga, sebagai sebuah respon atas realitas politik terutama demokrasi liberal atau representatif, populisme merupakan respon yang illiberal dalam demokrasi terhadap liberalisme yang tidak demokratis (Mudde, 2015). Argumentasi ini bukan menyatakan bahwasanya, populis tak demokratis, melainkan kontra demokrasi liberal. Untuk itu, dalam tulisan ini, pembahasan mengenai demokrasi radikal dengan memusatkan perhatiannya pada tokoh Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau. Pemikiran dari Mouffe dan Laclau akan dijadikan pisau bedah dan kerangka teori dalam menelaah populis kiri dan kritiknya terhadap demokrasi liberal secara filosofis.

Dipilihnya ide demokrasi radikal sebagai kerangka teoritik didasarkan pada argumentasi filsafat. Demokrasi radikal dipilih atas dasar dari perjuangan demokrasi radikal dalam mengkonstruksi kehendak kaum mayoritas yang hal tersebut dapat dipertarungkan dalam ruang diskusi. Mempertajam pada konteks demokrasi, populisme menjadi bagian penting dalam pemikiran Mouffe dan Laclau. Secara luas demokrasi radikal dapat diistilahkan sebagai upaya ide dalam menumbuhkan kembali 'pertentangan kelas' ke dalam demokrasi dan mengembalikan sejatinya apa itu demokrasi kepada kedaulatan rakyat dan kesetaraan.

II. METODE

Metode penelitian artikel ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka dengan model sistematis reflektif (Baker dan Zubair, 1990). Data yang diperoleh di inventarisasikan untuk ditindaklanjuti dengan cara evaluasi kritis. Kemudian, pada tahap pemeriksaan data, keberadaan data diinterpretasikan untuk membentuk pemahaman baru. Pada tahap berikutnya, data diproses melalui proses

induksi dan deduksi. dengan demikian, data akhir dapat di deskripsikan secara komprehensif untuk membentuk pemahaman logis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Teori Populisme

Diskursus tentang populisme sudah berlangsung cukup lama. Hal ini seiring dengan menyebarnya sistem demokrasi sekaligus tidak memadainya sistem demokrasi dalam memenuhi janji-janjinya sebagai kedaulatan dan kekuasaan rakyat. Müller (2016: 48-49) menjelaskan bahwa, kesuksesan populisme dapat dihubungkan dengan kegagalan demokrasi dalam memenuhi janji-janjinya, yakni kedaulatan rakyat dalam pengertian sebagai perwakilan dan pemberi mandat sah atas pelbagai kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya, pada tataran kenyataan, kehendak dan kepentingan rakyat diabaikan serta sistem perwakilan (demokrasi representatif) dikooptasi oleh segelintir elite. Pada konteks itu, populisme muncul sebagai gerakan sosial-politik dengan klaim atas nama rakyat dan membawa tuntutan rakyat.

Müller tidaklah sendirian. Beberapa pemikir politik Indonesia bernada sama dengan Müller: bahwa populisme merupakan paham anti-demokrasi. F. Budi Hardiman dalam opini *Kompas.com* berjudul Gerakan Murka dalam Demokrasi (2 Maret 2017) menyatakan bahwa: “populisme bukan pasangan ideal demokrasi. Jika dipaksakan, demokrasi populis tak lebih daripada “perkawinan tak bahagia” yang penuh kegalauan nafsu dan perselingkuhan.” Selain Hardiman, Fathorrahman Ghufon (*Kompas.com*, 27 Maret 2017) menyandingkan populisme dengan konservatisme dan fundamentalisme keagamaan, sehingga, dalam demokrasi, populisme menyekap siapapun yang rajin merajut konsolidasi kebangsaan, melakukan restorasi keumatan, dan dialog antaragama. Oleh Ghufon, populisme direduksi menjadi sekadar perkawinan dengan sentimen keagamaan dalam politik elektoral.

Menjamur dan menguatnya populisme kanan yang menggunakan retorika nasionalisme, primordialisme, agama, xenophobia, anti-asing dan anti-imigran dalam konstelasi politik global saat ini menjadi sorotan tersendiri dalam diskursus politik kontemporer. Populisme kanan yang menjamur dan menguat kerap kali diasosiasikan dengan populisme secara umum, sehingga populisme mendapat stigma negatif dan bersifat kontra demokrasi. Padahal terdapat kutub lain bernama populisme sayap-kiri yang memaknai populisme secara progresif sebagai persoalan filsafat. Menurut Laclau dan Mouffe, menjamur atau mendominasinya populisme kanan dalam suatu konstelasi karena absennya gerakan populis kiri (Laclau, 1977; Mouffe 2016). Oleh karena itu, kehadiran populisme kiri dalam kontestasi demokrasi menjadi lawan atas populisme kanan pada satu sisi dan alternatif atas hegemoni neoliberal pada sisi lain. Dengan demikian, batas politik antara kanan dan kiri serta politik adversarial hidup kembali dalam demokrasi.

Populisme, dalam pandangan Laclau dan Mouffe, dipahami dalam konteks demokrasi radikal. Populisme tidaklah anti-demokrasi seperti digunakan oleh

demokrasi liberal. Populisme justru meradikalkan demokrasi dan memperdalam pemahaman tentang demokrasi. Menurut Laclau: "*populism intends to grasp something crucially significant about the political and ideological realities to which it refers* (Laclau, 2005a: 3)." Baik Mouffe maupun Laclau, populisme dipahami sebagai transformasi struktur relasi kuasa dari hegemonik yang opresif dan represif dan populisme kiri diajukan sebagai reformisme radikal dari dimensi tersebut (Mouffe, 2018: 47).

Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau menawarkan proyek demokrasi radikal untuk menghadapi formasi hegemonik baru sebagai agenda membentuk kekuatan hegemonik yang berbeda dari lokus antagonisme melalui konstruksi kehendak kolektif dengan memperjuangkan populisme kiri (Chantal Mouffe, 2018: 46). Dalam demokrasi radikal, Mouffe dan Laclau mengajukan empat posisi teoritis: Pertama, agen sosial tidak dilihat sebagai relasi sosial produksi, melainkan sebagai lokus multiplisitas dari relasi-relasi sosial (ras, lingkungan, dan sex). Kedua, menolak pandangan yang memahami kesatuan formasi sosial sebagai diatur oleh logika ekonomi. Ketiga, mengajukan penciptaan formasi hegemonik melalui materialisasi yang diartikulasikan melalui hubungan-hubungan sosial secara timbal-balik. Keempat, menolak formasi hegemonik antagonisme untuk dapat mengkonstruksi relasi-relasi sosial yang tidak mendominasi satu sama lain (Panizza, 2005: 40).

Di samping itu, demokrasi radikal memperjuangkan konstruksi kehendak kolektif atau rakyat sebagai penanda kosong (*empty signifier*) yang terkonstruksi dalam medan diskursif untuk kemudian melahirkan pertarungan hegemonik. Situasi ini mensyaratkan rantai kesamaan (*chain of equivalent*) di antara kelompok sosial yang memiliki isu, tuntutan, dan lawan bersama (Laclau, 2005: 45). Kehendak kolektif yang dikonstruksi melalui rantai kesamaan (*chain of equivalent*) tidak berfokus pada satu "kelas" atau homogen, akan tetapi terdapat beragam kelas partikular yang disatukan secara heterogen oleh suatu benang merah menjadi sebuah kolektif universal.

Radikalisasi demokrasi menjadi konsep penting dalam pemikiran politik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (istilah lain untuk radikalisasi demokrasi: demokrasi radikal, demokrasi agonistik, dan demokrasi plural). Secara umum, demokrasi radikal dapat diartikan sebagai upaya teoritik untuk menghidupan kembali 'yang-politis' dengan relasi antagonisnya (termasuk di dalamnya afirmasi akan konflik dan kontestasi di tengah pluralitas masyarakat) dalam demokrasi dan mengembalikan demokrasi kepada kedaulatan rakyat dan kesetaraan. Dalam demokrasi radikal, konflik menubuh dalam relasi sosial yang plural dan oleh karenanya demokrasi menjadi lahan kontestasi di mana pelbagai identitas dan kepentingan aktor politik, terutama identitas dan kepentingan kolektif, saling terkonstruksi satu sama lain secara diskursif.

Identitas yang relasional dalam demokrasi radikal tersebut merupakan bentuk dari relasi adversial yang meniscayakan keterbelahan politik dengan menganggap 'oposisi' sebagai lawan (*adversary*), bukan musuh (*enemy*). Berdasarkan relasi adversarial tersebut, konflik dan kontestasi dalam demokrasi radikal tidak saling meniadakan eksistensi 'oposisi' (misalnya, dengan pembubaran dan kekerasan),

melainkan saling bertarung ideologi dan gagasan dalam memperebutkan diskursus di ruang publik. Pada konteks radikalisasi demokrasi tersebut, populisme dipahami sebagai jalan untuk memahami 'yang-politis' (*the political*) dengan relasi antagonismenya sebagai ontologi demokrasi radikal melalui pembelahan politik antara 'rakyat' *vis a vis* 'elite' dan mengembalikan demokrasi kepada prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan. Dengan demikian, populisme tidak bersifat kontra demokrasi (*undemocratic*), melainkan justru meradikalkan demokrasi.

3.2 Populisme Kiri Sebagai Perlawanan atas Krisis Demokrasi

Krisis demokrasi yang melanda beberapa negara telah menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi tradisional. Faktor yang melandasi terjadinya krisis demokrasi ini seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, ketegangan sosial, polarisasi politik yang mendalam dan perasaan alienasi di kalangan sebagian masyarakat. Krisis ini sering kali dihubungkan dengan perubahan ekonomi global, seperti globalisasi dan kebijakan neoliberal yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan merugikan kelompok-kelompok tertentu. Ketidaksetaraan tersebut dapat menciptakan ketidakpuasan dan perasaan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh institusi demokratis tidak lagi memperhatikan kepentingan sebagian besar rakyat. Dalam menghadapi krisis demokrasi, populisme kiri muncul sebagai gerakan politik yang menawarkan narasi alternatif dan solusi untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat.

Kaum populis mengambil keuntungan dari perasaan ini dan menyajikan narasi bahwa elit politik tidak lagi mewakili kepentingan rakyat secara merata. Mereka menekankan bahwa institusi-institusi demokratis, seperti parlemen atau kongres, terlalu terpolarisasi atau terperangkap dalam kepentingan kelompok tertentu, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan peningkatan ketegangan sosial. Maka dari itu diperlukanlah suatu revolusi demokratik untuk menciptakan lanskap baru dalam iklim perpolitikan. Konsekuensi dari terjadinya revolusi demokratik adalah kekuasaan tidak lagi menubuh pada diri seorang raja atau ratu dan orang yang memiliki keterikatan dengan otoritas transendental, kekuasaan akan menjadi milik semua orang, dalam bahasa Mouffe, kekuasaan menjadi 'ruang kosong' (*empty space*) (Mouffe, 2000: 1-2) yang bisa diisi oleh siapa saja. Demokrasi menjadi tanda bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada segelintir orang karena hubungan darah atau otoritas keilahian; kekuasaan menjadi milik rakyat (Zaenuri, 2019: 71).

Populisme dalam pandangan Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (2001) bukanlah ancaman terhadap demokrasi, tetapi merupakan alat untuk membangkitkan semangat demokrasi mayoritarian. Pada intinya, populisme menyoroti kehendak mayoritas rakyat dan memperlihatkan partisipasi politik yang lebih langsung dan aktif. Laclau dan Mouffe (2001) menggarisbawahi bahwa meradikalisasi demokrasi melalui populisme adalah cara untuk menjembatani kesenjangan antara elit politik dan mayoritas masyarakat yang mungkin merasa tidak

diwakili dalam keputusan politik karena demokrasi pada hari ini telah mengalami krisis.

Krisis demokrasi representatif tidak hanya merujuk pada masalah internal sistem demokrasi representatif itu sendiri, melainkan lebih mencerminkan krisis dalam bentuk aktualisasi atau penerapan konsep demokrasi pasca-demokrasi saat ini (Laclau & Mouffe, 2001). Pernyataan ini dapat dilihat dalam protes Indignados di Spanyol, di mana warga negara menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan mengatakan bahwa, meskipun memiliki hak untuk memilih, suara mereka tidak tercermin dengan baik dalam proses politik (Mouffe, 2016).

Populisme sendiri menolak pandangan bahwa demokrasi harus dibatasi pada aspek liberal yang sering kali berfokus pada hak individual dan minoritas. Sebaliknya, populisme menegaskan kepentingan mayoritas dan aspirasi bersama yang dapat membentuk dasar demokrasi yang lebih substansial (Laclau, 2005). Pandangan ini memunculkan pertanyaan kritis terhadap demokrasi liberal yang mungkin cenderung mengabaikan aspirasi dan kebutuhan mayoritas masyarakat. Salah satu elemen sentral dalam pandangan Laclau dan Mouffe adalah penolakan terhadap esensialisme. Mereka menolak pemikiran bahwa identitas politik dapat direduksi menjadi satu kategori tunggal, seperti kelas sosial berdasarkan logika ekonomi (Laclau & Mouffe, 2001). Ini dimaksudkan bahwa populisme harus dipahami sebagai upaya untuk mengakui kompleksitas identitas politik yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk kelas, etnisitas, dan isu-isu sosial lainnya.

Dengan menolak esensialisme Laclau dan Mouffe menganggap identitas sebagai hasil dari konstruksi sosial yang kompleks dan membuka jalan bagi inklusivisme dan pluralisme dalam populisme. Maka dari itu Laclau dan Mouffe melayangkan kritik terhadap demokrasi liberal yang mencakup aspek sosial dan budaya. Mereka menyoroti bagaimana demokrasi liberal cenderung memandang populisme sebagai ancaman karena dianggap merusak prinsip pluralisme dan hak minoritas. Populisme sering diidentifikasi dengan klaim mayoritarian, xenophobia, dan resistensi terhadap keberagaman, yang dianggap mengganggu tatanan pluralistik demokrasi liberal. Pada akhirnya, populisme kerap kali dilihat sebagai antitesis dari demokrasi, khususnya demokrasi liberal.

Namun, Laclau (2005) memahami populisme ini sebagai sebuah logika diskursif dari rantai persamaan, penanda kosong dan antagonisme. Maka dari itu, populisme sesungguhnya tidak secara langsung bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, populisme justru bagian dari demokrasi dan terlebih keduanya dapat dinyatakan secara bersamaan. Bahkan diskursus populis ini dapat menjadi angin segar untuk demokrasi liberal yang dianggap sudah menjadi sistem yang basi dan kuno. Demokrasi hanya dimungkinkan melalui populisme. Bagi Laclau, argumentasi ini dapat berlaku karena pandangan non-esensialismenya terhadap populisme dan demokrasi. Lebih lanjut lagi, Laclau juga menganggap bahwa demokrasi, populisme dan liberalisme merupakan hasil dari artikulasi kontingensi historis (Hutagalung, 2020, 270-271).

Populisme adalah kritikan atas sistem demokrasi representatif yang gagal menciptakan keadilan sosial dan menjadi penyambung lidah rakyat yang diwakilinya (Madung, 2023). Namun, karena populisme khususnya populisme kiri berusaha untuk menghadirkan harapan di tengah keresahan orang-orang, maka kerap kali populisme kiri ini dicemooh dan dianggap sebagai parasit. Cemoohan terhadap populisme sebagai parasit dalam demokrasi timbul dari ekspresi emosi yang diungkapkan oleh populisme. Beberapa emosi yang dapat diidentifikasi meliputi kemarahan, frustrasi, ketakutan, serta sentimen kebencian, yang semuanya tumpang tindih dalam konteks populisme kanan (Madung, 2023). Sebagai contoh, fenomena Trumpisme di Amerika Serikat mengeksploitasi perasaan marah, frustrasi, dan takut di antara masyarakat dengan menyoroti ancaman imigran terhadap identitas dan masa depan Amerika (Taufik & Pratiwi, 2021). Dalam populisme kanan, emosi kolektif dibangun seputar isu-isu etnisitas, keaslian (dalam kaitannya dengan status pribumi dan non-pribumi, termasuk imigran) dan xenophobia.

Penting untuk diketahui bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara populisme kanan dan populisme kiri dalam membentuk emosi kolektif. Populisme kanan cenderung menggunakan faktor-faktor seperti etnisitas dan asal-usul (pribumi vs. non-pribumi, termasuk imigran) untuk menciptakan ikatan emosional di antara para pendukungnya. Sebaliknya, populisme kiri membangun emosi kolektif dengan fokus pada isu-isu keadilan dan kesetaraan yang membangun harapan (Zaenuri, 2019). Sebagai contoh, gerakan Indigenous di Spanyol melawan korupsi dan ketidaksetaraan dengan menekankan pentingnya memiliki hak suara tetapi merasa tidak memiliki pengaruh dalam proses keputusan politik, dengan jargon mereka yang menyatakan, "Kita memiliki hak suara, tetapi kita tidak memiliki suara." Maka dari itu, Mouffe dan Laclau menyatakan bahwa demokrasi sangat membutuhkan emosi dan konfrontasi. Mouffe, kemudian, mengutip Spinoza untuk menjelaskan emosi, bahwa ada dua jenis emosi: rasa takut (*fear*) dan harapan (*hope*); kedua jenis emosi tersebut ada dalam demokrasi (Mouffe, 2016).

3.3 Konsep Demokrasi Radikal

Praktik konsensus politik sebagai hal pokok pada tataran demokrasi liberal hari ini telah mengaburkan sesuatu yang oleh Mouffe disebut dengan batas politik (*political frontier*) kanan dan kiri. Selain itu, dominasi politik konsensus dalam diskursus demokrasi mengakibatkan perbincangan demokrasi sekadar pada kontestasi pemilihan umum, perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum, sehingga mengabaikan prinsip demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dan kesetaraan (Mouffe, 2018). Dalam kondisi seperti itu, 'demokrasi radikal dan plural' dikonsepsikan sebagai radikalisme atas institusi-institusi demokrasi yang ada, dengan hasil berupa prinsip kebebasan dan kesetaraan dapat berlaku efektif dalam meningkatkan kuantitas relasi sosial (Mouffe, 2018: 48).

Pada demokrasi radikal tersirat penanda kritis atas kebebasan dan kesetaraan

yang masih memainkan peran yang signifikan dalam imajinasi politik masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa banyak perlawanan terhadap kondisi pasca demokrasi diekspresikan atas nama kesetaraan dan kedaulatan rakyat (Mouffe, 2018: 49). Penanda kritis tersebut dapat digunakan sebagai senjata yang kuat dengan menekankan aspek egalitarian guna membentuk perspektif baru bagi publik. Lebih jauh, penanda tersebut dapat diaktifkan untuk menumbangkan tatanan hegemonik demokrasi liberal dan membentuk tatanan hegemonik baru. Tatanan hegemonik baru itu mentransformasikan kehendak kolektif yang mengkonstruksi ulang artikulasi di antara liberalisme dan demokrasi yang sebelumnya telah disingkirkan oleh neoliberalisme, dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi sebagai peran utama.

Bentuk paling radikal dari kehendak kolektif itu akan terwujud apabila berakar pada yang-politis (*the political*). Yang-politis dimaksudkan sebagai dimensi antagonisme (konflikual) yang bersifat konstitutif terhadap koeksistensi manusia (Mouffe, 2005a: 9). Yang-politis dibedakan dengan politik (*politics*) yang merujuk pada rangkaian praktik, diskursus dan institusi yang memproduksi kebijakan dan mengorganisasi masyarakat yang selalu berada dalam keadaan konflik sebagai konsekuensi logis dari pengaruh dimensi ontologisnya, *the political* (Mouffe, 2013: 23; 2005a: 8-9).

Mouffe menyebutkan, pada pandangan Gramsci (2010) yang-politis diartikulasikan dalam konsepsinya, yaitu 'negara integral'. Pada konsep ini, Gramsci menggabungkan arti masyarakat politik sekaligus masyarakat sipil yang merepresentasikan medan perjuangan bagi hegemoni. Dalam pandangan ini, di samping aparat pemerintahan tradisional, negara juga tersusun dari pelbagai aparat dan ruang publik di mana berbagai kekuatan yang berbeda-beda saling berkontestasi untuk merebut hegemoni (Mouffe, 2018: 57). Berlandaskan itulah, latar belakang intervensi agonistik dapat muncul. Di mana terdapat ruang publik yang dapat menjadi ruang kemajuan demokrasi. Inilah mengapa strategi hegemonik harus melibatkan aparatur negara yang beragam tersebut supaya dapat mentransformasikannya, sehingga menjadikan negara sebagai kendaraan bagi pelbagai ekspresi tuntutan demokratik (Mouffe, 2018: 49).

Dalam demokrasi radikal, Mouffe dan Laclau melihat konflik tumbuh dalam relasi sosial yang plural dan oleh karenanya demokrasi menjadi lahan kontestasi di mana pelbagai identitas dan kepentingan aktor politik, terutama identitas dan kepentingan kolektif, saling terkonstruksi satu sama lain secara diskursif (Zaenuri, 2019: 69). Identitas yang relasional dalam demokrasi radikal tersebut digunakan sebagai jalan untuk memahami yang politis sebagai ruang kekuasaan yang memberi distingsi antara kita dan mereka (*we/they*). Keniscayaan distingsi antara kita dan mereka dalam politik membuat konsensus atau kesepakatan menjadi mustahil (Zaenuri, 2019: 75). Bagi Laclau dan Mouffe, tidak ada konsensus dalam demokrasi, yang ada hanyalah praktik hegemonik yang bersifat rentan dan terbuka untuk dilawan melalui praktik kontra-hegemonik.

Namun, Mouffe dan Laclau juga menjelaskan yang dipertaruhkan dalam

pertarungan hegemoni bukanlah ‘melenyapkan’ seberang-dalam hal ini negara dan lembaga-lembaga plural lainnya, tetapi sebuah transformasi mendalam dari lembaga-lembaga tersebut guna melayani radikalisi demokrasi. Tujuannya bukanlah perebutan kekuasaan negara, tetapi seperti yang dikatakan Gramsci, ‘negara yang terus-menerus menjadi’ (*becoming state*) (Mouffe, 2018: 58). Hilangnya konsensus, mengakibatkan masyarakat rentan untuk merosot kepada konfrontasi berkepanjangan akibat provokasi fisik, kekerasan, bahkan peperangan. Mouffe dan Laclau memberikan solusi dengan mensyaratkan akan transformasi akan relasi antagonisme kepada relasi agonisme dan transformasi ini menjadi tugas dari demokrasi (Mouffe, 2005a: 19-21).

Relasi antagonisme menimbulkan relasi antara kita sebagai teman dan mereka sebagai musuh (*antagonistic friend/enemy relation*) dalam politik, yang terbuka lebar akan implikasi ketidaksepakatan (*disensus*) berupa provokasi fisik, kekerasan bahkan pemusnahan yang-lain yang berbeda. Kondisi ini mengharuskan konstruksi atas relasi kita dan mereka secara berbeda tanpa menghapuskan dimensi konflik pada satu sisi dan tidak terjebak pada negosiasi atau kompromi (*konsensus*) melalui deliberasi pada sisi lain. Dengan kata lain, konflik haruslah diartikan tidak merusak asosiasi politik. Pada konteks ini, relasi konfliktual antara kita dan mereka yang tumbuh dalam politik diterjemahkan secara konstruktif melalui relasi agonisme (Zaenuri, 2019: 76).

Relasi agonisme berarti relasi antara kita sebagai teman dan mereka sebagai lawan (*agonistic friend/adversary relation*). Lawan (*adversary*) menjadi kategori yang penting dalam melakukan transformasi dari relasi antagonisme ke relasi agonisme-oleh karenanya disebut juga model *adversarial* atau politik *adversarial*. Lawan berbeda dengan musuh (*enemy*); lawan merupakan oposisi yang memiliki kesamaan posisi dalam demokrasi tetapi ideologi, kepentingan dan gagasannya berbeda dan harus ditolak, sedangkan musuh harus ditolak baik eksistensi maupun ideologi atau gagasannya. Kategori *adversary* ini mendasarkan diri pada konsep identitas yang relasional; bahwa identitas ke-“kita”-an senantiasa bersifat korelasi dengan identitas ke-“mereka”-an (Zaenuri, 2019: 76).

Mouffe dan Laclau menyatakan jika demokrasi sangat membutuhkan emosi (*afeksi*) dan konfrontasi. Mouffe mengutip Spinoza dengan mengatakan kalau emosi dibagi menjadi dua, yaitu ketakutan (*fear*) dan harapan (*hope*). Kedua emosi tersebut ada dalam demokrasi (Zaenuri, 2019: 73). Lebih jauh, bagi Mouffe, partai sayap kanan menggunakan ketakutan (*political of fear*) guna memobilisasi masa. Sedangkan partai sayap kiri menggunakan harapan (*political of hope*) yang mengakarkan pada perihal keadilan dan kesetaraan. Dengan pernyataan tersebut, Mouffe seolah-olah mengatakan jika emosi memang ada di dalam demokrasi-layaknya glorifikasi rasionalitas pada demokrasi yang selama ini lebih populer.

Kehadiran agama juga memberikan keniscayaan dalam menghadirkan emosi pada demokrasi. Tak hanya itu, komunitas nasionalistik juga diikat oleh emosi

(afeksi) ketimbang rasionalitas. Dengan mengutip Slavoj Žižek, Mouffe menjelaskan jika bentuk nasionalisme mengikat anggota-anggotanya melalui *enjoyment* (kesenangan subjek) akan mitos nasional (Mouffe, 2005a: 27). Terdapat hasrat dan fantasi akan kebersatuan komunitas politik bernama nasionalisme dan afeksi tersebutlah yang memungkinkan keberadaan nasionalisme. Kosa kata yang digunakan Mouffe untuk afeksi dalam politik adalah *passions*, yakni varian kekuatan afeksi yang menjadi benih bentuk identifikasi kolektif (Mouffe, 2005a: 24).

Selain menjadi sebuah ikatan kolektif, *passions* juga memungkinkan menjadi landasan mobilisasi politik. Mobilisasi mensyaratkan politisasi, tetapi politisasi tidak dapat eksis tanpa produksi akan dunia yang terepresentasi secara konfliktual, dengan kelompok yang saling berposisi di mana rakyat dapat mengidentifikasi, oleh karena itu memungkinkan untuk *passions* dimobilisasi secara politis dalam spektrum proses demokratik (Mouffe, 2005a: 25). Pada konteks *passions* atau afeksi tersebut, populisme sebagai anak kandung sah demokrasi memperjelas keniscayaan afeksi dalam demokrasi. Cemoohan atas populisme sebagai parasit dalam demokrasi berasal dari emosi yang dipertontonkan oleh populisme (Zaenuri, 2019: 73-74).

3.4 Populisme Kiri dan Demokrasi Radikal: Kritik Atas Demokrasi Liberal

Kontestasi politik hari ini disebut oleh beberapa ahli sebagai kondisi 'pascademokrasi'. Jacques Rancière dalam bukunya *Disagreement: Politics and Philosophy* (1999: 102), menyebutkan bahwa pasca demokrasi adalah sebagai konsep praktek dari demokrasi setelah rakyat (*post-demos*) yang memarjinalkan partisipasi rakyat sebagai satu-satunya interaksi dalam sebuah negara. Berbeda dengan Rancière, Mouffe dan Laclau memahami pascademokrasi sebagai dua artikulasi tradisi yang berbeda secara historis, yaitu: tradisi politik liberalisme – pembelaan hak kebebasan individu – dan tradisi demokrasi – kedaulatan rakyat dan kesetaraan.

Menanggapi kondisi ini, Mouffe (2000), menjelaskan artikulasi dari tradisi politik liberalisme dan demokrasi dalam menghasilkan pendefinisian demokrasi liberal sebagai *politeia*. Logika demokrasi mengenai kehendak bersama, dalam logika demokrasi liberal, direduksi pada aspek kebebasan individu. Demokrasi liberal sendiri telah mereduksi nilai tatanan demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dan kesetaraan, serta kemungkinan masyarakat untuk menggunakan hak-hak demokratis dalam ruang agonistik untuk saling berkonfrontasi turut dilenyapkan. Kondisi tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial-ekonomi sehingga menyebabkan munculnya ketidaksetaraan politik (Bimantoro, 2023).

Dalam demokrasi liberal, kepemilikan individu dan persaingan pasar bebas merupakan bentuk kesetaraan yang menggantikan kebebasan individu dan kesetaraan politik. Sebagai konsekuensi dari tereduksinya tatanan nilai demokrasi, kedaulatan rakyat dan kesetaraan, yang tersisa dari demokrasi liberal hanya proses elektoral dan pembelaan terhadap hak asasi manusia (Bimantoro, 2023). Proses elektoral dalam demokrasi liberal tidak lagi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan alternatif, tetapi hanya sebuah kesempatan dalam

bentuk 'partai-partai pemerintah' tradisional (Mouffe, 2020: 19). Maka dari itu, basis normatif dari konsepsi demokrasi liberal tentang identitas sangat terbatas hanya pada kesetaraan dan kebebasan politik yang diturunkan dari kepentingan dan tujuan individu otonom. Pada akhirnya basis normatif mengenai identitas kolektif hanya bersifat instrumental karena masyarakat liberal mengharapkan realisasi terbaik dari kepentingan mereka sendiri dalam jaminan hak dan kebebasan mereka sendiri. Hal tersebut membuat partisipasi politik cenderung dilihat sebagai pertukaran kepentingan individu dan tindakan politik sebagai sarana nasional untuk memenuhi tujuan hidup seseorang (Schaal dan Heidenreich, 2016: 127).

Charles Taylor mengidentifikasi dua masalah utama dengan model liberal ini. Taylor (1993: 110) mengacu pada keberatan pertama sebagai 'masalah keberlangsungan hidup' masyarakat liberal. Demokrasi liberal tidak dapat menciptakan masyarakat yang stabil karena tidak ada identifikasi sukarela warga negara dengan pemerintahan. Taylor (1993) menganggap identifikasi dapat berhasil terutama melalui rasa partikularitas dan keterkaitan sejarah bersama. Akan tetapi, kedua hal tersebut sulit dicapai dalam demokrasi liberal. Masalah mendasar kedua dari demokrasi liberal ditandai dengan semboyan 'etnosentrisme' (Taylor, 1993). Dalam keberatan ini, model politik liberalisme melalui hubungannya dengan institusi bebas tidak dapat diterapkan pada masyarakat heterogen dengan banyak identitas berbeda. Salah satu konsekuensi utama dari konsepsi liberalisme tentang politik identitas adalah munculnya konflik identitas yang tidak dapat terselesaikan, di mana individu dan kelompok saling berkonfrontasi dengan konsepsi identitas mereka sendiri (Bimantoro, 2023).

Mouffe berargumen bahwa penekanan demokrasi liberal terhadap konsensus dan hak individu mengarah pada depolitisasi konflik dan aspek antagonis politik. Sebagai gantinya, politik harus merangkul gagasan agonisme, yang mengakui adanya perbedaan pada kepentingan dan berusaha untuk membentuk ruang bagi konfrontasi demokratis, daripada mengedepankan basis konsensus pada masyarakat (Mouffe, 2000). Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau melalui proyek populisme kiri dan demokrasi radikal berusaha untuk merekonstruksi medan diskursif demokrasi dan mengembalikan tatanan demokrasi pada kedaulatan rakyat dan kesetaraan, sehingga permasalahan politik identitas dapat diatasi.

Konsep demokrasi radikal yang diajukan oleh Mouffe dan Laclau memiliki dimensi sosialis, seperti yang dinyatakan Mouffe dan Laclau:

"...proyek demokrasi radikal memiliki dimensi sosialis, dengan memutus relasi-relasi kapitalisme yang menjadi sumber dari relasi subordinasi, akan tetapi dimensi sosialis ini merupakan komponen dari demokrasi radikal, bukan sebaliknya." (Laclau dan Mouffe, 2001: 178)

Bagi Mouffe, membangun hubungan nilai-nilai politik melalui implementasi strategi populis kiri dalam demokrasi adalah jalan yang tepat bagi aspirasi-aspirasi politik (Mouffe, 2020: 49). Dalam demokrasi radikal, konflik yang muncul pada relasi

sosial yang plural menjadi arena kontestasi bagi berbagai identitas. Identitas yang relasional adalah bentuk dari relasi adversial dengan munculnya dikotomi politik 'oposisi' (*adversary*) dan bukan musuh (*enemy*). Relasi adversarial dalam demokrasi radikal mengamini jalannya berbagai kontestasi konflik terhadap pluralitas identitas yang tidak meniadakan eksistensi (dari oposisi) relasi tersebut berjalan dengan kontestasi konflik gagasan antar pluralitas identitas untuk mengambil ruang diskursus publik.

Dalam demokrasi radikal, demokrasi diartikulasikan sebagai arena di mana terjadinya konflik dan perbedaan pendapat dimungkinkan, sehingga politik demokratis mengenai kebebasan dan kesetaraan dapat mungkin untuk diterima. Strategi populisme kiri dalam demokrasi radikal berusaha untuk mengkonstruksi tatanan hegemonik baru terhadap kerangka konstitusi demokrasi liberal. Populisme kiri dalam demokrasi radikal hendak membentuk suatu kehendak kolektif 'rakyat' yang terwujudkan melalui formasi hegemonik yang baru dengan menempatkan nilai-nilai konstitusi demokrasi pada peran yang seutuhnya (Mouffe, 2020:55).

Populisme kiri mensyaratkan kekuatan hegemonik baru melalui konstruksi rakyat yang berlawanan dengan formasi hegemonik sebelumnya. Bagi Laclau, keberhasilan perjuangan hegemonik ditentukan dengan tidak berdasarkan pada artikulasi logika bentuk eksternal ke dalam ruang partikular. Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau menawarkan proyek demokrasi radikal untuk menghadapi formasi hegemonik baru sebagai agenda membentuk kekuatan hegemonik yang berbeda dari lokus antagonisme melalui konstruksi kehendak kolektif dengan memperjuangkan populisme kiri (Mouffe, 2018: 46). Proyek populisme kiri Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau dalam melalui demokrasi radikal dapat menjadi pilihan alternatif yang layak untuk mengatasi permasalahan politik identitas di berbagai belahan dunia.

Politik demokratik yang hanya melihat eksklusivitas dan kesepakatan konsensus di antara kepentingan-kepentingan yang saling berkonfrontasi tidak akan pernah mencapai dua nilai substantif demokrasi: kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Ketidaksanggupan model demokrasi liberal dalam memenuhi kebebasan dan kesejahteraan setiap individu disebabkan bahwasanya kebebasan menjadi penting dalam proses terbentuknya kesetaraan sekaligus pluralitas (*equality of difference*). Penalaran praktis (*practical reasons*) dalam diskursus publik tidak bersifat rasional universal dan objektif, akan tetapi menghasilkan dislokasi terhadap yang berbeda, yang disebut sebagai "logika ekuivalensi" (*logic of equivalence*). Proyek demokrasi radikal memperjuangkan konstruksi kehendak kolektif dalam medan diskursif pertarungan hegemonik yang mensyaratkan rantai kesamaan (*chain of equivalence*) di antara kelompok sosial yang partikular dalam sebuah diskursus.

IV. SIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa populisme telah menjadi fenomena politik global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dapat dilihat populisme dijadikan alat untuk mengambil hati rakyat dan dijadikan saran

tujuan untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Populisme memiliki dampak yang kompleks pada tatanan demokrasi liberal, dengan mengancam prinsip-prinsip pluralisme dan kesetaraan. Namun, konsepsi demokrasi radikal yang diajukan oleh Mouffe dan Laclau dapat menjadi alternatif yang layak untuk mengatasi permasalahan politik identitas dalam demokrasi liberal. Mouffe dan Laclau menawarkan proyek demokrasi radikal untuk menghadapi formasi hegemonik baru sebagai agenda membentuk kekuatan hegemonik yang berbeda dari lokus antagonisme melalui konstruksi kehendak kolektif dengan memperjuangkan populisme kiri.

Demokrasi radikal menekankan pentingnya emosi dan konfrontasi dalam politik, serta mengakui adanya perbedaan dan konflik dalam kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung mengedepankan konsensus dan hak individu. Kritikan demokrasi radikal dalam memandang depolitisasi dan aspek antagonisme dalam demokrasi liberal dan mengajukan pendekatan politik yang lebih inklusif dan pluralistik yang mengakui dan melibatkan beragam identitas dan kepentingan dalam masyarakat. Dalam demokrasi radikal, konstruksi kehendak kolektif melalui medan diskursif pertarungan hegemonik menjadi fokus utama dengan menghasilkan rantai kesamaan di antara kelompok sosial yang partikular. Di samping itu, demokrasi radikal memperjuangkan konstruksi kehendak kolektif atau rakyat sebagai penanda kosong (*empty signifier*) yang terkonstruksi dalam medan diskursif untuk kemudian melahirkan pertarungan hegemonik. Situasi ini mensyaratkan rantai kesamaan (*chain of equivalent*) di antara kelompok sosial yang memiliki isu, tuntutan, dan lawan bersama. Namun, perlu diingat bahwa populisme juga memiliki ambiguitas dan paradoks, serta mendapatkan kecaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap populisme dan konsepsi demokrasi radikal untuk menghadapi tantangan politik identitas yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, A., & Charis Zubair, A. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Penerbit Kanisius
- Bimantoro, F. A. (2023). *Politik Identitas Di Indonesia Ditinjau Dari Kerangka Populisme Kiri Chantal Mouffe Dan Ernesto Laclau* [Skripsi]. Universitas Gadjah Mada.
- Gellner, E. (N.D.). *Populism: Its Meaning And National Characteristics*. Macmillan.
- Ghufron, F. (2023, November 4). Lubang Hitam Populisme. *Kompas.Id*.
- Gramsci, A. (2010). *Prison Notebooks* (J. A. Buttigieg, Ed.; J. A. Buttigieg, Trans.). Columbia University Press.
- Hardiman, F. B. (N.D.). Gerakan Murka Dalam Demokrasi. *Kompas.Id*.
- Hutagalung, D. (2020). *Yang-Politis Sebagai Ontologi Primer: Pemikiran Pasca-Fondasionalisme Ernesto Laclau* [Disertasi]. Universitas Indonesia.
- Laclau, E. (1977). *Politics And Ideology In Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism*.

Nlb.

- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). *Hegemony And Socialist Strategy*. Verso Books.
- Madung, O. G. (2023, June 16). Populisme Dan Krisis Demokrasi. *Media Indonesia.Com*.
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. Verso.
- Mouffe, C. (2005). *On The Political*. Routledge.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking The World Politically*. Verso.
- Mouffe, C. (2016, April 29). In Defence Of Left-Wing Populism. *The Conversation*.
- Mouffe, C. (2018a). *For A Left Populism*. Verso.
- Mouffe, C. (2018b, September 13). Demonizing Populism Won't Work: Europe Needs A Progressive Populist Alternative. *The London School Of Economics And Political Science*.
- Mouffe, C. (2020). *The Return Of The Political*. Verso Books.
- Mudde, C. (2015, February 17). The Problem With Populism. *The Guardian*.
- Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Müller, J. W. (2016). *What Is Populism?* University Of Pennsylvania Press, Incorporated.
- Panizza, F. (Ed.). (2005). *Populism And The Mirror Of Democracy*. Verso.
- Rancière, J. (1999). *Disagreement: Politics And Philosophy*. University Of Minnesota Press.
- Schaal, G. S., & Heidenreich, F. (2016). *Einführung In Die Politischen Theorien Der Moderne*. Verlag Barbara Budrich.
- Taufik, T., & Pratiwi, S. A. (N.D.). American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran Ke Amerika Serikat. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 6(1). Taylor, C., Gutmann, A., & Habermas, J. (1993). *Multikulturalismus Und Die Politik Der Anerkennung* (A. Gutmann, Ed.). Fischer.
- Toha, A. T. (2018, Desember). *Memilih Presiden*. Zaenuri, M. (2019). *Konsep Populisme Dalam Pemikiran Post-Marxisme Ernesto Laclau Dan Chantal Mouffe* [Skripsi]. Universitas Gadjah Mada.